

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Adnan, Soerjono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Amir, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, cetakan III, Navila Idea, Yogyakarta.
- Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Rineka Cipta, Jakarta
- Arliman, 2012, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Bambang, 1982. *Pandangan Terhadap Asas-asas umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, 2001, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mannan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.
- Muladi, Barda N.A. 1984, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Pompe, 2008. *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta

- Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Santoso, Muhari Agus. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Averroes Press, Malang.
- Sarmadi, 2009, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung
- Soemitro, Ronny H. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono, 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono, 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor
- Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono dan Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yahman . Tarigan, 2016, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Surabaya.

Jurnal dan Internet

- Jecky Tengens. “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-> diakses pada tanggal 7 Maret 2019
- Kuat Puji Prayitno. 2012. *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakkan Hukum In Concreto)*. Jurnal

Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, Volume 12 No.3.

Lasmadi, Sahuri. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi, <http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/kimih/article/download/530/484+&cd>, diunduh pada 20 Januari 2020.

Tedjosaputro, Liliana dan Krismiarsi. 2012. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8 No.1 <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1081/993>, diunduh pada 5 Juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

_____, Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

_____, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM.

_____, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

_____, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

_____, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

_____, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

_____, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

_____, International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR) atau Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Surat Kapolri No Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat..

